

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Perjalanan politik dari masa ke masa hampir tidak memberi tempat layak kepada kaum perempuan, seperti yang terjadi di India, untuk berpartisipasi dalam posisi simetris, sederajat, dan saling bersinergi dengan laki-laki. Politik bahkan secara kultural lebih banyak mengeksploitasi perempuan. Oleh karena itu, kaum perempuan harus menyadari bahwa mereka bukanlah obyek yang pasif dalam politik.

India sekarang ini sering disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ketiga. Bukan saja karena jumlah pemilihnya yang besar dalam setiap pemilihan umum, lebih dari itu India sejak kemerdekaannya pada tahun 1947 telah berhasil mempertahankan stabilitas pemerintahan demokrasi parlementer serta telah melaksanakan pemilihan umum yang relatif teratur.

India mempunyai suatu konstitusi sekuler dan demokratis yang berdasarkan pada persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa adanya pengaruh baik itu dari perbedaan agama maupun primordialisme. Komitmen rakyat India pada demokrasi terkesan sangat besar terlihat dari peningkatan jumlah pemilih dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan.

India menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multi partai yang kuat. Majelis rendah disebut *Lhok Sabha* (majelis rakyat)

1. ... 545 ... Majelis Rendah disebut *Lhok Sabha* (majelis Rakyat)

bagian) dengan anggota 250 orang. Wakil perempuan pada tahun 1991 sebanyak 5,2% dari seluruh anggota *Lhok Sabha* dan 9,8% dari seluruh anggota *Rajya Sabha*.<sup>1</sup> Persentase ini lebih rendah jika dibandingkan dengan parlemen sebelumnya (1989). Hasil pemilihan umum tahun 1996 memperlihatkan kemunduran yang jauh dalam hal representasi perempuan, tapi pada pemilihan tahun 1999, 8,8% dari anggota parlemen adalah perempuan. Kecenderungan yang demikian yang cukup mencemaskan seperti ditampilkan oleh prakarsa negara akhir-akhir ini untuk menjamin representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik.

Fenomena tersebut membuat tema ini menarik untuk diangkat, dimana Negara yang disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia ketiga, namun keterlibatan perempuan di Negara ini masih rendah. Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Pusat di India.”

## **B. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi berjudul “Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Pusat di India” ini bertujuan untuk:

1. Membahas secara ilmiah mengenai fenomena perpolitikan di India yang unik dan sangat menarik, bagi semua yang menaruh minat terhadap studi Hubungan Internasional, terutama mengenai peran perempuan-perempuan

---

1. P. N. Chatterjee, *Women and Politics Worldwide*, New Haven: Yale University

India dalam bergelut dengan dunia politik.

2. Menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah terhadap realitas yang ada, sehingga dapat menjelaskan, mendeskripsikan dan memprediksikan fenomena yang ada.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Perempuan memiliki derajat lebih rendah daripada laki-laki, inilah anggapan umum yang berlaku selama ini mengenai kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat. Hal itu tercermin dalam anggapan-anggapan umum seperti wanita adalah makhluk yang lemah lembut, seorang wanita identik menjadi beban laki-laki karena laki-laki lah yang memberi nafkah kepada istri, dan sebagainya. Anggapan-anggapan ini mendapat penguatan dari struktur moral masyarakat yang terwujud dalam aturan-aturan agama dan adat istiadat.

Salah satu tokoh Gerakan Pembebasan Perempuan di Pakistan, Nadeshda Shvedova, mengatakan bahwa laki-laki mendominasi arena politik, memformulasikan aturan permainan politik dan mendefinisikan standar evaluasi. Secara kultural politik lebih banyak mengeksploitasi perempuan daripada menjadi wadah pemberdayaan.<sup>2</sup> Tidak hanya di India, tetapi hampir di seluruh bagian negara di dunia perempuan cenderung menjadi nomor dua sehingga tidak

---

<sup>2</sup> "Kendala-Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen," dalam <http://www.int->

mengerankan jika dalam peta politik India, kaum perempuan banyak mengalami ketidakadilan dalam pembagian kursi kuota.

Salah satu tokoh yang memperjuangkan kepentingan wanita dalam politik adalah Mahatma Gandhi. Gandhi menganggap bahwa partisipasi perempuan dalam kehidupan bernegara merupakan wujud dari bentuk emansipasi yang diberikan kepada wanita. Tokoh lain yang mendorong emansipasi wanita adalah Jawaharlal Nehru. Dia menganggap bahwa revolusi terbesar dalam suatu negara haruslah memperhatikan status dan kondisi kehidupan wanita dalam negara tersebut. Nehru merancang sejumlah aturan perundang-undangan untuk meningkatkan status wanita, namun karena popularitasnya yang kurang memadai, Nehru tidak mampu mengubah pandangan tradisional anggota parlemen untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut.<sup>3</sup>

Tuntutan yang lebih besar bagi representasi perempuan dalam institusi-institusi politik di India sebenarnya tidak berjalan sistematis sampai dengan terbentuknya komite mengenai status perempuan di India (*Committee on the Status of Women in India / CSWI*). Sebelum komite ini dibentuk fokus dari gerakan perempuan yang mulai tumbuh sekitar akhir tahun 1970-an hanya terbatas pada persoalan peningkatan posisi sosial ekonomi perempuan. Dalam perkembangan selanjutnya, representasi perempuan dalam institusi-institusi politik perlahan mulai ditingkatkan terutama pada tingkat akar rumput antara lain melalui kebijakan kuota kursi untuk perempuan. Pada tahun 1988, rencana

---

<sup>3</sup> "Emancipating India's Women Discrimination as Part of Hindu Culture",

Perspektif Nasional untuk Perempuan mengusulkan supaya kuota 30% bagi perempuan diperkenalkan di seluruh tingkatan badan-badan pemilihan. Kelompok-kelompok perempuan mendesak agar kuota dibatasi pada aras *panchayat* (dewan desa) untuk mendorong partisipasi akar rumput dalam politik. Konsensus di sekitar tuntutan itu berhasil dengan dimasukkannya Amandemen ke-73 dan Amandemen ke-74 dalam konstitusi India tahun 1993.

Masalah kuota kembali mencuat pada tahun 1995, namun kali ini tertuju pada perempuan dalam parlemen. Keberatan ini terpusat di sekitar dua isu pokok: pertama, isu kuota yang tumpang-tindih bagi perempuan pada umumnya dan bagi perempuan dari kasta yang lebih rendah. Kedua, isu elitisme. Sebagian besar kelompok perempuan merasa bahwa isu kasta dapat memecah-belah kaum perempuan. Banyak pula yang khawatir mengenai pemberian hak-hak istimewa kepada perempuan elite dengan menjamin kursi bagi mereka di parlemen, sedangkan sebelumnya mereka mendukung kuota bagi perempuan pada aras akar rumput *panchayat*. Hingga kini amandemen tersebut belum disahkan parlemen. Namun, pemerintah nasionalis Hindu BJP berjanji untuk mengajukan rancangan undang-undang kuota yang lain untuk perempuan dalam parlemen.

Laporan-laporan mutakhir di India menunjukkan bahwa banyak politisi perempuan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, apalagi hendak menyamakan jurang perbedaan gender yang ada. Misalnya laporan dari *Times of India* edisi bulan Februari 1998 menjelaskan bahwa perempuan India mengalami kesulitan untuk menjadi bagian dari kerangka politik. Bahkan politisi

ditemukan perempuan yang berada dalam posisi kepemimpinan. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik di India dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**

**Tingkat Partisipasi Perempuan Di Kursi Parlemen  
Di Beberapa Negara<sup>4</sup>**

<b>Negara</b>	<b>Jumlah</b>
Finland	39
Norway	39
Sweden	34
Denmark	33
Netherlands	31
Germany	21
New Zealand	21
Austria	21
USA	20
Poland	13
Czech Republic	10
Russian Federation	10
Bangladesh	10
UK	9
Belgium	9
Australia	9
Chile	8
Mexico	8
India	7
France	6
Thailand	4
Japan	3
Turkey	2

Sumber: The World's Women 1995: Trends and Statistics. United Nations, New York, 1995.

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa partisipasi perempuan India dalam sistem politik jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara demokrasi lainnya. Hanya sedikit persentase jumlah perempuan yang menduduki jabatan politis baik di tingkat majelis rendah maupun di tingkat majelis tinggi. Perhatikan tabel di

<sup>4</sup> Bai, S.M. "Women's Marginal Role in Politics" IDS Bulletin, Vol. 26, No. 3, Juli

bawah.

**Tabel 1.2**  
**Representasi Perempuan India Di Dalam Majelis Rendah (*Lok Sabha*)**

Periode	Total Kursi	Anggota Wanita	Persentase
1967-1971	520	31	6.0
1971-1977	520	20	3.8
1977-1980	542	19	3.5
1980-1984	529	28	5.3
1984-1989	542	42	7.7
1989-1991	523	23	4.4
1991-1996	536	39	7.2
1996	543	35	6.4

Sumber: Election Commission of India, Institute of Social Sciences, New Delhi 1995.

Persentase representasi perempuan di dalam majelis rendah (*lok sabha*) sangat minim dibandingkan dengan jumlah total kursi yang ada di majelis rendah. Sekalipun persentase tersebut mengalami peningkatan pada periode 1984-1989 sebesar 7,7 persen, namun pada periode selanjutnya mengalami penurunan. Demikian pula persentase perempuan didalam majelis tinggi (*rajya sabha*) lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ada dalam majelis rendah (*lok sabha*). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah;

**Tabel 1.3**  
**Representasi Perempuan India Di Dalam Majelis Tinggi (*Rajya Sabha*)**

Tahun	Total Kursi	Anggota Wanita	Persentase
1971	243	17	7,0
1977	244	25	10,2
1980	244	24	9,8
1985	244	28	11,4
1990	245	24	9,7
1991	245	38	15,5
1992	245	17	6,9
1994	245	20	8,1
1996	245	15	6,1

Sumber: statistical Abstract, 1996, Election Commission of India, New Delhi, 1996.

politik terutama di parlemen. Akan tetapi, kecenderungan yang terdapat dalam situasi politik di India justru memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen masih sangat rendah.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah: **“Mengapa keterlibatan perempuan di dalam parlemen pusat di India masih rendah?”**

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk membahas permasalahan diatas, dapat digunakan teori hambatan bagi keterwakilan perempuan dalam parlemen yang dikemukakan oleh Nadeshda Shvedova, adapun hambatan tersebut diantaranya adalah hambatan yang bersifat institusional (hambatan yang bersifat kelembagaan). Penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan faktor-faktor sosial, struktur politiklah yang memainkan peran yang lebih menentukan dalam rekrutmen anggota parlemen perempuan.<sup>7</sup> Yaitu pada sistem pemilihan umum, partai politik dan ketiadaan sistem kuota bagi keterwakilan politik perempuan. Sistem pemilihan umum yang menimbulkan hambatan bagi keterwakilan perempuan misalnya adalah sistem pemilu dengan sistem distrik. Perempuan harus bersaing dengan kontestan laki-laki di dalam distrik yang jumlahnya lebih banyak sedangkan kursi yang diperebutkan hanya

---

<sup>7</sup> “Kendala-Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Parlemen,” dalam <http://www.int->

sedikit. Partai politik yang secara organisasi masih lemah dan cenderung bergantung pada elit setempat juga mengakibatkan hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Sedangkan untuk sistem kuota, yang menyebabkan hambatan bagi keterwakilan perempuan di bidang politik adalah pemberian persentase kuota yang masih rendah bagi perempuan di dalam parlemen tingkat daerah (*Lhok Sabha*) dan ketiadaan kuota bagi perempuan dalam parlemen tingkat tinggi (*Rajya Sabha*) sehingga dengan sendirinya akan menyebabkan rendahnya representasi perempuan dalam proses politik.

Sedangkan hambatan yang lain adalah hambatan non institusional yaitu hambatan yang berupa hambatan sosial budaya yaitu adanya budaya patriarki dalam masyarakat, serta hambatan dalam ekonomi dengan banyaknya perempuan yang miskin.<sup>8</sup> Budaya masyarakat yang patriarkhi telah menempatkan laki-laki pada posisi yang istimewa sementara wanita berada dalam posisi terbelakang dan tertinggal dari kegiatan publik. Hal ini menjadi halangan bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasinya di bidang yang lebih luas karena budaya masyarakat lebih memprioritaskan dan memberi keistimewaan bagi laki-laki baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun negara.

Untuk menghilangkan hambatan yang bersifat institusional (hambatan yang bersifat kelembagaan) atau hambatan politik, *gender mainstreaming* dalam pengimplementasiannya diutamakan ke dalam pelaksanaan pemilihan umum dan partai politik serta penerapan sistem kuota. Dalam sistem pemilihan umum di

---

<sup>8</sup> Azza Karam, *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta,

mana pelaksanaan dari pemilihan umum ini tidak boleh merugikan terhadap keterwakilan politik perempuan. Pemilihan umum yang dilakukan oleh suatu negara haruslah mengutamakan kesetaraan gender baik itu dalam pelaksanaannya yang melibatkan semua warga negara baik itu laki-laki atau perempuan, dalam perekrutan para pegawai penyelenggara pemilihan umum, maupun dalam sistem perekrutan kandidat calon anggota parlemen yang akan dipilih oleh para pemilih, semua itu haruslah mencerminkan kesetaraan gender. Sistem pemilihan yang dianut oleh suatu negara haruslah membawa dampak yang baik bagi partisipasi politik perempuan. Dalam kaitannya dengan partai politik, pelaksanaan kesetaraan gender akan memudahkan bagi keterwakilan perempuan dalam politik dengan catatan bahwa partai politik haruslah mengutamakan kesetaraan gender dalam perekrutan anggota-anggota partainya maupun sebagai pengurus partainya, mencantumkan kesetaraan gender sebagai salah satu program partai mereka, mencantumkan nama-nama kandidat perempuan sebagai daftar calon anggota parlemen dari partai mereka, bahkan dalam beberapa kasus, partai politik harus mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan masalah perempuan dalam program kampanye mereka, dengan kata lain partai politik haruslah menjadi jembatan yang utama yang dapat mempermudah keterwakilan perempuan di parlemen.

Selain dengan adanya sistem pemilihan umum dan partai politik yang mendukung perempuan, ada lagi hal yang tidak kalah pentingnya untuk mempermudah keterwakilan perempuan yaitu adanya sistem kuota yang diterapkan oleh suatu negara. Kuota digunakan untuk mempermudah perekrutan

..... sebagai anggota parlemen. Apabila dalam suatu negara perempuan

yang terlibat dalam politik sebagai anggota parlemennya sangat kurang, maka kuota ini wajib digunakan untuk memberikan jatah tertentu bagi perempuan agar mereka dapat menjadi anggota parlemen. Setiap kuota yang diterapkan oleh negara tentulah berbeda-beda, tetapi pada dasarnya kuota itu haruslah mendukung bagi keterwakilan perempuan, dengan adanya kuota secara tidak langsung mencerminkan pengakuan negara terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia politik khususnya anggota parlemen. Keberadaan kuota haruslah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan dan tidak hanya diberlakukan pada perempuan kalangan masyarakat tertentu saja.

Untuk menghilangkan hambatan non institusional, kesetaraan gender difokuskan ke dalam masalah ekonomi, kesejahteraan umum dan pendidikan masyarakat terutama kaum perempuan, serta kesetaraan gender di dalam kehidupan keluarga dan agama. Dalam masalah ekonomi, kesetaraan gender diimplementasikan ke dalam pasar/bursa kerja. Ekonomi dan kesejahteraan umum adalah faktor yang penting bagi perempuan, karena dengan memiliki ekonomi yang mapan serta kesejahteraan yang baik secara langsung kemiskinan perempuan akan hilang, dan ia pun akan mampu untuk bersaing dengan laki-laki sebagai kandidat anggota parlemen. Hal penting lain untuk menghilangkan hambatan non institusional bagi perempuan yang akan terjun ke dunia politik adalah kesetaraan gender di dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang dipakai oleh suatu negara terkadang membatasi kiprah perempuan terutama bagi perempuan yang ingin

..... untuk menjadi anggota parlemen

anggota parlemen, tentulah seorang perempuan memerlukan pendidikan yang tinggi walaupun tidak mutlak diperlukan.

Kesetaraan dan keadilan gender yang diupayakan dalam kehidupan baik yang bersifat institusional dan non institusional merupakan faktor penting yang dapat menghilangkan hambatan-hambatan bagi keterwakilan perempuan di dalam politik baik itu hambatan yang bersifat institusional maupun hambatan non institusional.

Perbedaan gender (*gender different*) secara biologis, pada akhirnya melahirkan peran gender (*gender role*) yang kemudian membawa kepada suatu konsep ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender bisa didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak setara, tidak seimbang dan sederajat dalam hubungan peran, kedudukan dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dan dalam memperoleh hak-haknya di bidang politik, hukum, ekonomi dan bidang-bidang lainnya.<sup>9</sup>

Ketidakadilan gender bisa berupa marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, subordinasi, pelabelan negatif (*stereotype*) yang mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan lainnya. Ketidakadilan gender juga seringkali melahirkan kekerasan (*violence*) perempuan dan beban ganda yang harus ditanggung oleh perempuan. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, telah mengakibatkan adanya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan domestik. Beban kerja perempuan

keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Keadilan gender berarti persamaan visi, kekuasaan dan partisipasi antara kedua jenis kelamin dalam semua bidang kehidupan baik pribadi atau publik.<sup>10</sup> Target dari keadilan gender mencakup beberapa aspek, yang pertama adalah pengakuan dan implementasi penuh dari hak-hak perempuan, pembangunan dan peningkatan demokrasi yang representatif melalui promosi kesetaraan partisipasi di bidang politik dan publik antara laki-laki dan perempuan, kemandirian ekonomi, memberdayakan anak laki-laki dan perempuan melalui sistem pendidikan, dan menghilangkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Dengan keadilan gender berarti tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.<sup>11</sup> Keadilan gender juga diartikan sebagai suatu kondisi dan perlakuan yang adil tanpa ada perbedaan dalam hubungan, peran, kedudukan, hak, tanggungjawab dari fungsi antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat dari, *pertama* adalah seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan dan perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan. *Kedua*, adalah seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya.

---

<sup>10</sup> "Gender Mainstreaming", <http://www.unec.org/stats/gender/web/genpols/genpols-1.htm>, diakses tanggal 23 Februari 2007

<sup>11</sup> "Kesetaraan dan Keadilan Gender", oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 7-9 Januari

*Ketiga*, seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan sebagainya.<sup>12</sup>

Kesetaraan gender juga diupayakan dalam satu kerangka kerja yang disebut *gender mainstreaming*, dalam setiap sektor pembangunan seperti pendidikan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM. *Gender mainstreaming* merupakan perwujudan dari komitmen global penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), berkaitan dengan kesamaan kesempatan dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Pada tahun 1997, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), menerapkan *gender mainstreaming* sebagai suatu metodologi dari keseluruhan sistem kerja dalam mewujudkan kesetaraan gender.

“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all policies, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and equality is not perpetuated. The ultimate goal is so to achieve gender equality.”<sup>14</sup>

Dalam *gender mainstreaming* diperlukan beberapa hal, pertama adalah *political will*, yang merupakan kehendak negara atau pemegang otoritas tertinggi (seperti organisasi) yang mengeluarkan pernyataan, menjelaskan tujuan *gender*

<sup>12</sup> Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Malang, Bayu Media Publishing, 2003, hal. 55.

<sup>13</sup> Ace Suryadi, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Bandung, PT. Genesindo, 2004, hal. 12-13.

Kesetaraan gender di dalam bidang institusional (bersifat kelembagaan) dan non institusional merupakan hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, karena kesetaraan gender dalam bidang institusional dan non institusional yang diterapkan oleh suatu negara akan menghilangkan penghambat bagi keterwakilan politik perempuan, baik itu hambatan institusional maupun hambatan non institusional. Dengan hilangnya hambatan-hambatan bagi keterwakilan politik perempuan maka dengan

kontrol untuk memberikan masukan, kritik atau perubahan kebijakan. Perempuan hanya dijadikan sebatas penerima kebijakan tanpa memiliki akses dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga strategis pembuat keputusan. Dalam bidang politik, konsep kaidakadilan gender ditunjukkan dengan proses pembuatan kebijakan.

partisipasi yang penuh dari perempuan dalam kehidupan publik dan politik, serta dana), sumber daya manusia (latihan bagi para pembuat kebijakan), serta hubungan gender dalam sarana-sarana finansial (biasanya pemisahan relokasi keempat adalah, adanya *study gender*, yang mencakup pengetahuan umum tentang kelamin). Statistik ini penting, untuk meyakinkan para pembuat kebijakan. Yang statistik bagi laki-laki dan perempuan (statistik yang dipisahkan berdasarkan jenis mendukung program *gender mainstreaming*. Yang ketiga, adanya statistik-adanya suatu Kebijakan Kesetaraan Gender dalam bidang tertentu yang akan *mainstreaming* adalah untuk mencapai kesetaraan gender. Yang kedua, adalah

## **F. Hipotesa**

Setelah melihat Latar Belakang Masalah serta Pokok Permasalahan mengenai peran perempuan dalam parlemen pusat di India, hipotesis yang bisa saya ambil adalah, bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen pusat di India khususnya adalah adanya hambatan-hambatan institusional bagi keterwakilan perempuan. Hambatan institusional antara lain sistem pemilihan umum India yaitu sistem distrik, partai politik India yang secara organisasi lemah dan masih bergantung pada elit setempat, dan sistem kuota yang kurang mendukung representasi perempuan di dalam parlemen India.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menerapkan pola-pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal, laporan media massa, serta sumber-sumber yang relevan lainnya termasuk data yang diperoleh dari berbagai website yang terkait dengan permasalahan yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan teori atau konsep yang dianggap tepat, sehingga diperoleh analisa yang akurat atas permasalahan yang ada.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh bahan analisis, maka